

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN PADA  
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

**SKRIPSI**

**NUR KHUMAIRAH ELY  
18622123**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG  
2023**

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN PADA  
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Akuntansi

**OLEH**

**NAMA: NUR KHUMAIRAH ELY  
NIM: 18622123**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG  
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI**

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN PADA  
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

Diajukan Kepada:

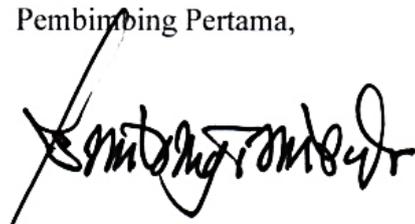
Panitia Komisi Ujian  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan  
Tanjungpinang

Oleh:

NAMA : NUR KHUMAIRAH ELY  
NIM : 18622123

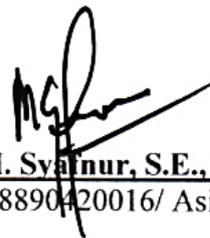
Menyetujui,

Pembimbing Pertama,



**Bambang Sambodo, S.E., M.Ak.**  
NIDK.8833900016/ Lektor

Pembimbing Kedua,



**M. Syaiful, S.E., M.M.**  
NIDK. 8890420016/ Asisten Ahli

Menyetujui,  
Ketua Program Studi



**Hendy Satria, S.E., M.Ak., CAO**  
NIDN. 1015069101/ Lektor

**Skripsi Berjudul**

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP  
KEMANDIRIAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA  
TANJUNGPINANG**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

NAMA : NUR KHUMAIRAH ELY  
NIM : 18622123

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal  
Sebelas Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan  
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

**Panitia Komisi Ujian**

Ketua,



**Bambang Sambodo, S.E., M.Ak.**  
NIDK. 8833900016/ Lektor

Sekretaris,



**Meidi Yanto, S.E., M.Ak.**  
NIDK. 8804900016/ Lektor  
Anggota.

**Fauzi, S.E., M.Ak.**

NIDK. 8928410021/ Asisten Ahli

Tanjungpinang, 11 Januari 2023

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan

Tanjungpinang,

Ketua,



**Charly Marlinda, S.E., M.Ak.Ak.CA.**

NIDN. 1029127801/ Lektor

## PERNYATAAN

Nama : Nur Khumairah Ely  
NIM : 18622123  
Tahun Angkatan : 2018  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.26  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
Terhadap Kemandirian Keuangan Pada Pemerintah  
Kota Tanjungpinang.

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap di proses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 18 Januari 2023

Penyusun,



**NUR KHUMAIRAH ELY**

**NIM: 18622123**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah rabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat, ridho, nikmat, dan kasih sayang Allah SWT saya dapat menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat. Dan baginda nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kepada seluruh umatnya, termasuk peneliti sehingga dapat mendorong peneliti untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Semua perjuangan yang telah saya lewati hingga titik penyelesaian skripsi ini saya persembahkan khususnya kepada:

NUR KHUMAIRAH ELY  
Serta Mama dan Papa Tercinta

Kepada Nur Khumairah Ely skripsi ini dipersembahkan terkhusus untuk dirimu yang telah berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih telah berjuang hingga akhir dan percaya diri untuk bisa menjalani setiap proses penyusunan skripsi.

Kepada mama saya tercinta (Yuliana) yang selalu senantiasa berdoa untuk kelancaran pendidikan anak-anaknya, sosok yang selalu memberikan dukungan serta motivasi dalam kondisi apapun. Terimakasih atas didikan yang diberikan sehingga penelitian ini bisa diselesaikan dengan baik.

Kepada papa saya tersayang (Rajab Ely) yang hingga saat ini senantiasa selalu memberikan dukungan dalam situasi dan kondisi apapun, terimakasih karena telah mendidik dan memberikan motivasi yang luarbiasa dalam hal apapun dan demi kelangsungan penelitian ini bisa diselesaikan dengan baik, semoga menjadi ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri untuk kedua orangtua.

Kepada adik-adik saya (Muhammad Fadillah Sulaiman Ely dan Agustina Zahra Ely) terimakasih telah menjadi adik yang selalu ada disegala situasi mejadi tempat curhat saya. Terimakasih selalu memberikan support untuk segera menyelesaikan skripsi sehingga bisa memberikan motivasi untuk adik-adiknya untuk sekolah.

## HALAMAN MOTO

*“Only you can change your life. Nobody else can do it for you”*

Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

*“You’re just too busy comparing yourself to other to see. Those comparisons aren’t the only measure. Don’t say it’s all pointless. You’ve worked hard and made yourself better. That’s what you got in return. So don’t put yourself down like this.”*

Kaizaki Arata

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini dengan judul **“PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) Program studi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, dalam penulisannya penulis menyadari adanya keterbatasan kemampuan dan kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang membangun perlu untuk disampaikan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini, dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak-pihak yang ikut serta dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, S.E.,M.Ak.Ak.CA. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E.,M.Si.Ak.CA. selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E.,M.Si.Ak.CA. selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Ir. Imran Ilyas, M.M. selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

5. Bapak Hendy Satria, S.E.,M.Ak.,CAO selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Bapak Bambang Sambodo, S.E.,M.Ak. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan saran, arahan, dan perbaikan mulai tahap penyusunan proposal hingga tahap akhir. Sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak M.Syafnur, S.E.,M.M. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan untuk perbaikan penelitian ini.
8. Seluruh dosen pengajar dan staf sekretariat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
9. Kepada diri saya sendiri **NUR KHUMAIRAH ELY** terimakasih sudah bertahan dan berjuang sampai titik terakhir. Segala perjuangan dalam menempuh ini tidak mudah, tanggis dan tawa menggiringi perjalanannya.
10. Kepada mama, papa serta adik-adikku yang selalu support dalam situasi dan kondisi apapun, terimakasih telah mendidik kakak dan memberikan motivasi dalam hal apapun terutama dalam menyelesaikan penelitian ini, serta doa-doa yang tidak pernah putus untuk anak-anakmu sehingga penelitian ini bisa terselesaikan dengan baik.
11. Terimakasih kepada sahabat-sahabat Gangnam ku yang terkasih Annisa, Aulia, Intan, Melyawaty, Mutia, Sheila, dan Thasya. Terimakasih atas motivasi dan dukungan untuk berjuang bersama menyelesaikan pendidikan S1 bersama-sama. Terimakasih dan selamat untuk kita yang telah

menyelesaikan pendidikan S1 ini dengan baik serta sukses selalu untuk kita semua.

12. Terimakasih kepada kakak Cici yang senantiasa memberikan dorongan dan memberikan motivasi saya untuk menyelesaikan penelitian ini dan juga memberikan wawasan yang luas.
13. Terimakasih juga kepada teman sebangku kuliah Dwi Yulia dan Kartika Wulan yang sedang berjuang bersama serta untuk teman-teman seperjuangan Akuntansi Sore 1 2018 STIE Pembangunan Tanjungpinang.
14. Terimakasih kepada partner skripsi saya Annisa , Melyawaty, Intan, Kak Ika dan Kak Cici yang senantiasa berbagi ilmu dan juga sharing mengenai skripsi sehingga kita semua dapat menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat. Selamat berbahagia untuk kita semua atas gelar yang telah disandang.
15. Untuk semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih semuanya.

Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca, terkhusus Mahasiwa/i Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Tanjungpinang, 30 September 2022

Peneliti

Nur Khumairah Ely

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	8
1.3    Tujuan Penelitian.....	9
1.4    Batasan Penelitian .....	9
1.5    Kegunaan Penelitian.....	9
1.5.1    Kegunaan Ilmiah .....	10
1.5.2    Kegunaan Praktis .....	10
1.6    Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1    Tinjauan Teori .....	13
2.1.1 <i>Agency Theory</i> (Teori Keagenan) .....	13
2.1.2    Akuntansi Sektor Publik .....	14
2.1.3    Penganggaran Sektor Publik .....	15
2.1.4    Pendapatan Daerah.....	16

2.1.5	Kemandirian Keuangan Daerah .....	26
2.2	Kerangka Pemikiran .....	28
2.3	Hipotesis .....	29
2.4	Peneliti Terdahulu .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>36</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	36
3.2	Jenis dan Sumber Data .....	36
3.3	Tenknik Pengumpulan Data .....	37
3.4	Populasi dan Sampel .....	38
3.4.1	Populasi .....	38
3.4.2	Sampel .....	38
3.5	Definisi Operasional Variabel .....	39
3.6	Teknik Pengolahan Data .....	41
3.7	Teknik Analisis Data .....	42
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>48</b>
4.1	Hasil Penelitian .....	48
4.1.1	Gambaran Umum Kota Tanjungpinang .....	48
4.1.2	Analisis Hasil Penelitian .....	52
4.1.3	Teknik Analisis Data .....	62
4.2	Pembahasan .....	74
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>79</b>
5.1	Kesimpulan .....	79
5.2	Keterbatasan .....	80
5.3	Saran .....	80

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## ***CURRICULUM VITAE***

## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah .....	6
2.	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah .....	6
3.	Kerangka Pemikiran .....	29
4.	Bagan Struktur Organisasi .....	51
5.	Grafik Realisasi Pajak Daerah .....	54
6.	Grafik Realisasi Retribusi Daerah .....	58
7.	Grafik Rasio Kemandirian Keuangan .....	61
8.	Grafik Histogram Uji Normalitas .....	63
9.	Hasil Uji Normalitas .....	64
10.	Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	67

## DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1.	Realisasi PAD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .....	5
2.	Rasio Kemandirian Kuangan Daerah .....	28
3.	Definisi Operasional Variabel .....	40
4.	Data Realisasi Pajak Daerah .....	53
5.	Data Realisasi Retribusi Daerah .....	56
6.	Data Rasio Kemandirian Keuangan .....	59
7.	Hasil Analisis Statistik Deskriptif .....	62
8.	Hasil Uji Normalitas .....	65
9.	Hasil Uji Multikolinearitas .....	66
10.	Hasil Uji Autokorelasi .....	68
11.	Hasil Analisis Linear Berganda .....	69
12.	Hasil Uji t (Pengaruh Secara Parsial) .....	71
13.	Hasil Uji F (Pengaruh Secara Stimultan) .....	73
14.	Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	74

## **DAFTAR LAMPIRAN**

No.	Judul Lampiran
Lampiran 1	: Data Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Lampiran 2	: Laporan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Lampiran 3	: Laporan Realisasi Anggaran 2017-2021
Lampiran 4	: Hasil Output SPSS 26
Lampiran 5	: Persentase Plagiat
Lampiran 6	: Surat Pernyataan Selesai Penelitian

## **ABSTRAK**

### **PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

Nur Khumairah Ely. 18622123. Akuntansi. STIE Pembangunan  
Tanjungpinang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan pada Pemerintah Kota Tanjungpinang pada tahun 2017-2021, apakah pajak daerah dan retribusi daerah dapat memberikan kontribusi yang besar untuk tingkat kemandirian pada Kota Tanjungpinang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan jenis data sekunder berupa data realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bersumber dari objek penelitian yaitu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tanjungpinang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun 2017 hingga tahun 2021 bersama-sama dapat mempengaruhi kemandirian keuangan pada Pemerintah Kota Tanjungpinang. Hal ini dapat terlihat dari hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 18,9% berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kontribusi sebesar 18,9% yang masuk ke dalam kategori kurang untuk rasio Kemandirian Keuangan. Sisanya sebesar 81,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

**Kata Kunci :** Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Kemandirian Keuangan

Dosen Pembimbing I : Bambang Sambodo, S.E., M.Ak

Dosen Pembimbing II : M. Syafnur, S.E., M.M

## **ABSTRACT**

### ***THE EFFECT OF REGIONAL TAXES AND LOTS OF RETRIBUTION ON FINANCIAL INDEPENDENCE IN TANJUNGPINANG CITY GOVERNMENT***

Nur Khumairah Ely. 18622123. *Accounting*. STIE Pembangunan Tanjungpinang.

*This study aims to determine the effect of regional taxes and regional levies on financial independence in the Tanjungpinang City Government in 2017-2021, whether regional taxes and regional levies can make a major contribution to the level of independence in Tanjungpinang City.*

*The type of research used is quantitative research with secondary data types in the form of data on the realization of Regional Taxes and Regional Levies originating from the research object, namely the Regional Tax and Retribution Management Agency (BPPD) of Tanjungpinang City.*

*The results of this study indicate that the receipt of Regional Taxes and Regional Levies in 2017 to 2021 can affect the financial independence of the Tanjungpinang City Government. This can be seen from the results of the test for the coefficient of determination ( $R^2$ ) of 18.9%, based on these results it can be concluded that local taxes and regional levies contribute 18.9% which is included in the less category for the financial independence ratio. The remaining 81.1% is influenced by other variables not examined in this study.*

*Keywords: Regional Taxes, Regional Levies, Financial Independence*

Dosen Pembimbing I : Bambang Sambodo, S.E., M.Ak

Dosen Pembimbing II : M. Syafnur, S.E., M.M

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan berlakunya Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang mengalami dua kali perubahan sebelum menjadi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Setiap kabupaten atau kota berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya di daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonom. Tiap-tiap kabupaten atau kota mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat(2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Dalam prakteknya kedua Undang-Undang di bidang otonomi daerah dalam bentuk otonomi daerah yang menyeluruh, murni, dan bertanggung jawab.

Pengaturan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan konsep desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, sesuai dengan pembagian kewenangan. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi disediakan oleh APBD (Anggaran Pendapatan belanja Daerah), pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan asas dekonsentrasi disediakan oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara),

dan pembiayaan penyelenggaraan yang berkaitan dengan tugas pembantuan disediakan oleh anggaran pemerintah Novalistia (2016).

Pemerintah Daerah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar pada era desentralisasi fiskal ini, yang didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun fasilitas publik. Diharapkan terjadi peningkatan pelayanan diberbagai sektor, terutama sektor publik dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal ini, sehingga akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk dapat membuka usaha di daerah. Jadi sudah sepantasnya pemerintah mengubah komposisi belanja, yang dimana selama ini belanja daerah dialokasikan pelayanan publik. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dinilai harus mampu dalam mengalokasikan anggaran belanjanya.

Gambaran daerah otonomi daerah dapat dilihat dari seberapa besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan untuk masyarakat pada daerahnya. Dalam tujuan daerah otonomi, pemerintah daerah harus dapat beradaptasi dan juga berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan melakukan perbaikan di berbagai sektor yang dimungkinkan berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pada jurnal Nugraha (2016) salah satu sumber yang paling penting dalam penyelenggaraan desentralisasi adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dapat meningkatkan atau mengurangi ketergantungan daerah pada pemerintah pusat. PAD adalah sumber pendanaan

utama yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah yang mana merupakan salah satu komponen penyumbang Pendapatan Asli Daerah terbesar, yang diharapkan mampu membiayai belanja pemerintah daerah. Oleh karena itu, otonomi daerah dan juga pembangunan daerah dapat diwujudkan apabila tingkat kemandirian keuangan daerah yang efektif.

Kemudian menurut Aristanti (2011) pajak merupakan iuran rakyat untuk kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut Sunarto and Sunyoto (2016) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa kemandirian ekonomi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Dimana kemandirian daerah menggambarkan

ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal atau yang disebut pemerintah pusat.

Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menggali potensi yang ada sudah optimal, dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerahnya untuk mendanai kegiatan atau program yang menjadi tujuan pemerintah daerahnya. Didukungnya sumber potensi alam serta kemajuan pembangunannya Kota Tanjungpinang menjadi salah satu tempat wisata bersejarah yang akan menarik wisatawan dari mancanegara. Dalam hal ini seharusnya dapat meningkatkan sumber pendapatan pajak daerah terutama pada pajak hotel dan juga pajak restoran. Di sisi lain pembangunan yang semakin maju seperti dibangunnya fasilitas umum dan pusat perbelanjaan yang menjadi kunjungan masyarakat setempat maupun dari luar daerah Kota Tanjungpinang dengan hal itu akan meningkatkan pendapatan retribusi daerah dari retribusi parkir. Namun organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam mengelolanya sudah berupaya dengan potensi yang ada, namun pemerintah agar lebih dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada.

Menurut data yang diperoleh dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang pada tahun 2017-2021 mengalami penurunan, untuk tahun 2017 sebesar Rp 166.033.851.282,31 menurun menjadi Rp 160.470.588.593,64 dan pada tahun berikutnya hingga tahun 2021 mengalami penurunan disetiap tahunnya. Pada tahun 2020-2021 realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah pada Kota Tanjungpinang mengalami penurunan yang drastis dikarenakan adanya pandemi

covid-19, sehingga berdampak pada penerimaan PAD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi menurun.

Berikut ini adalah data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam 5 tahun belakangan ini sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang dalam 5 Tahun (Rupiah)**

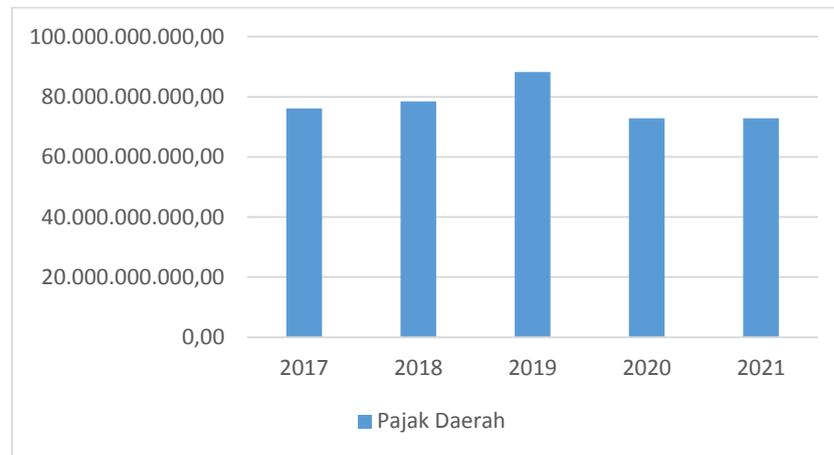
No.	Tahun	PAD	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
1.	2017	166.033.851.282,31	76.081.970.441,50	5.843.730.897,00
2.	2018	160.470.588.593,64	78.443.997.385,00	5.662.406.503,00
3.	2019	149.227.320.456,27	88.227.869.310,00	4.096.393.978,00
4.	2020	145.817.521.914,88	72.878.358.594,00	3.365.855.244,00
5.	2021	141.055.774.159,07	72.864.733.466,00	3.016.530.368,00

*Sumber: LRA Kota Tanjungpinang (data diolah), 2022*

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat perolehan PAD terbesar pada tahun 2017 tentunya banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh daerah dalam menggali sumber penerimaan PAD nya sehingga perolehan PAD mengalami peningkatan.

Pajak merupakan salah satu komponen pembentuk Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang pada tahun 2019 perolehan pajak daerah terbesar, adapun penerimaan pajak Kota Tanjungpinang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak parkir yang mana masing-masing pajak memberikan kontribusi yang berbeda-beda.

**Gambar 1. 1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tanjungpinang (Rupiah)**

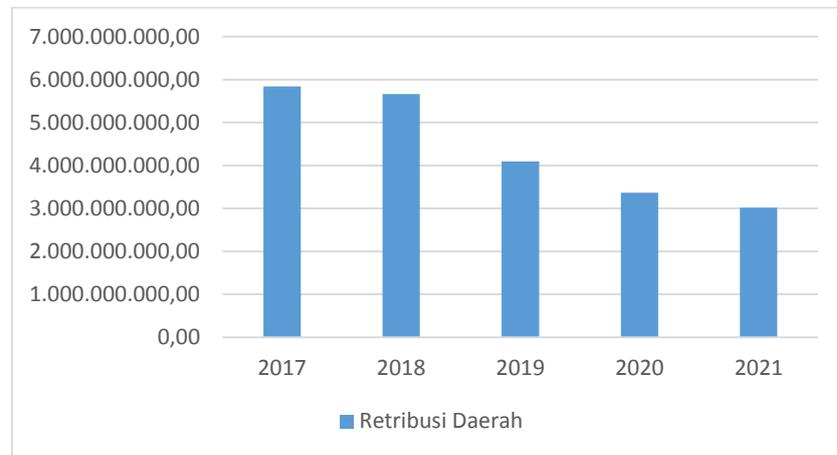


Sumber: Data diolah penulis, 2022

Dari gambar 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun 2017-2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun tahun berikutnya 2020 hingga tahun 2021 penerimaan pajak daerah mengalami penurunan yang sangat drastis. Penurunan penerimaan pajak daerah ini terjadi karena adanya pandemi yang membuat penerimaan pajak daerah mengalami penurunan.

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan salah satu komponen penting dalam pendapatan asli daerah. Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa, dan retribusi perijinan. Jenis retribusi jasa umum terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pemakaman, parkir tepi jalan umum. Jenis retribusi jasa usaha terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, terminal, tempat khusus parkir, rumah potong hewan, tempat rekreasi dan olahraga. Jenis retribusi perijinan tertentu terdiri dari retribusi ijin mendirikan bangunan, ijin gangguan, ijin trayek, dan retribusi ijin mempekerjakan tenaga kerja asing.

**Gambar 1. 2**  
**Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang (Rupiah)**



Sumber: Data diolah penulis, 2022

Dapat dilihat dari gambar 1.2 bahwa penerimaan perolehan retribusi daerah Kota Tanjungpinang tidak sebesar perolehan pajak daerah. Dalam kurun 5 tahun perolehan retribusi terbesar yaitu pada tahun 2017 kemudian mengalami penerunan yang signifikan disetiap tahunnya.

Dalam perkembangannya pelaksanaan otonomi daerah tidak diringi dengan mandirinya keuangan pemerintah daerah. Hal itu mencerminkan masih adanya ketergantungan pemerintah daerah pada dukungan keuangan dari pemerintah pusat dalam bentuk dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini terbentuk fenomena kemandirian keuangan daerah, meskipun pendapatan daerah semakin meningkat. Beberapa faktor yang dapat menentukan besarnya pendapatan daerah yang diteliti dalam penelitian ini adalah besarnya penerimaan pajak daerah dan pembayaran daerah. Untuk mengetahui apakah pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan maupun secara parsial berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Febriayanti dan Faris (2017) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah memperoleh hasil yang menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sunarto dan Sunyoto (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemampuan Daerah yang Berdampak Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah memperoleh hasil bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Mamonto, Kalangi, dan Tolosang (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal menunjukkan hasil yang berbeda yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Bedasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Pada Pemerintah Kota Tanjungpinang”. Dimana untuk menilai tingkat kemandirian keuangan daerah yang digambarkan menggunakan rasio yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pajak daerah mempengaruhi kemandirian keuangan Kota Tanjungpinang?

2. Apakah retribusi daerah mempengaruhi kemandirian keuangan Kota Tanjungpinang?
3. Apakah pajak daerah dan retribusi daerah mempengaruhi kemandirian keuangan Kota Tanjungpinang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang ada, maka tujuan pada penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap kemandirian keuangan Kota Tanjungpinang.
2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan Kota Tanjungpinang.
3. Untuk mengetahui pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan Kota Tanjungpinang.

### **1.4 Batasan Penelitian**

Untuk menghindari perluasan masalah terhadap pembahasan masalah yang akan diteliti, maka penulis membatasi masalah dengan data yang akan diteliti pengaruhnya yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran Kota Tanjungpinang dengan periode penelitian dari tahun 2017-2021.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diambil pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

### **1.5.1 Kegunaan Ilmiah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pedoman untuk penelitian khususnya dibidang akuntansi tentang Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Pada Pemerintahan Kota Tanjungpinang.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

#### **1. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan informasi teoritis dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan ataupun penerimaan pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan Kota Tanjungpinang.

#### **2. Bagi Akademisi**

Penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam bidang ilmu akuntansi sektor publik terkhusus dalam melihat seberapa berpengaruh pendapatan pajak dan retribusi daerah terhadap kemandirian.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan hasil penelitian ini agar lebih mudah dipahami, maka dalam penyusunan hasil penelitian ini menggunakan sistematika penelitian yang terdiri dari lima bab, yaitu:

**BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini diuraikan secara singkat mengenai latar belakang dari masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini terdiri dari teori-teori yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisis pemecahan masalah yang telah dikemukakan. Teori yang didapat bersumber dari jurnal dan buku yang menunjang untuk memecahkan permasalahan dan akhirnya mencapai tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis dan penelitian terdahulu.

**BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, jenis data penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang hasil pembahasan dengan menjelaskan gambaran umum objek penelitian, analisis hasil penelitian dan pembahasan.

**BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang akan diberikan oleh peneliti baik bagi peneliti selanjutnya, bagi subjek, dan bagi program studi akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### **2.1.1 *Agency Theory* (Teori Keagenan)**

*Grand theory* pada penelitian ini menggunakan teori *Agency*. Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan yaitu suatu hubungan atau kontrak antara satu orang atau lebih (*principals*) yang melibatkan orang lain (*agents*). Prinsipal yaitu orang-orang yang menanamkan modalnya ke dalam perusahaan sedangkan agen yaitu orang yang bekerja dan memberikan informasi kepada prinsipal. Hubungan antara prinsipal dan agen ketika prinsipal memberikan wewenang kepada aseen untuk mengambil keputusan bisnis yang menguntungkan dalam perusahaan yang akan diberikan sebagai sumber informasi bagi prinsipal dalam pengambilan keputusan. Teori keagenan mengakibatkan hubungan yang asimen antara pemilik dan pengelola, untuk menghindari terjadinya hubungan yang asimetri tersebut dibutuhkan suatu konsep yaitu konsep *corporate governance* yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan lebih sehat.

Teori keagenan menurut Nugroho (2017) menjelaskan bahwa hubungan agensi terjadi ketika *principal* mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Dengan demikian *agent* dapat memanipulasi pelaporan mengenai perusahaan untuk disampaikan kepada *principal*, hal ini dikarenakan setiap manajer mempunyai kebutuhan ekonomi yang besar, termasuk

memaksimalkan kompensasinya dengan cara melakukan praktik manajemen laba. Teori keagenan digunakan untuk memahami isu *corporate governance* dan manajemen laba.

### **2.1.2 Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada didalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas dan organisasi nirlaba lainnya, Mardiasmo, (2018)

Menurut Halim dalam jurnal Kadafi & Putra, (2013) istilah akuntansi sektor publik mulai mengemuka seiring dengan arus reformasi yang melahirkan konsep otonomi daerah. Sebagai konsekuensi dari otonomi daerah adalah tentang pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Untuk dapat menghasilkan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan diperlukan akuntansi. Akuntansi yang demikian termasuk dalam lingkup disiplin akuntansi sektor publik.

Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (*purposive activity*). Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Akuntansi digunakan baik pada sektor swasta maupun sektor publik untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang memengaruhi.

### **2.1.3 Penganggaran Sektor Publik**

Dalam jurnal Novitasari (2019) anggaran merupakan “pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter”. Anggaran dalam akuntansi sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Penganggaran dalam akuntansi sektor publik adalah aktivitas yang penting karena berkaitan dengan proses penentuan alokasi dana untuk aktivitas dan program pemerintahan.

Penganggaran sektor publik merupakan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Anggaran merupakan artikulasi dari perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah dibuat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun.

Menurut Wahyuningsih (2015) dalam jurnalnya menjelaskan, siklus anggaran keuangan daerah terdiri atas perencanaan pelaksanaan, pengawasan dan pemeriksaan, dan penyusunan dan penetapan perhitungan APBD. Penganggaran terbagi ke dalam empat tahapan, yakni *executive planning*, *legislative approval*, *executive implementation*, dan *ex post accountability*. Adapun tahapan penganggaran lainnya yaitu, tahap persiapan (*preparation*), tahap ratifikasi (*ratification*), tahap implementasi (*implementation*) dan tahap pelaporan dan evaluasi (*reporting and evaluation*). Pada tahapan persiapan dan ratifikasi, terjadi interaksi antara eksekutif dan legislatif dan politik anggaran saling mendominasi, sementara pada tahapan implementasi dan pelaporan serta evaluasi melibatkan birokrasi sebagai *agent*.

Sebelum era Reformasi, pendekatan penentuan besaran anggaran untuk setiap kegiatan adalah pendekatan inkremental. Dengan kata lain, jumlah rupiah hanya ditambahkan atau dikurangi dari pos anggaran yang ada. Penganggaran yang buruk di masa lalu pada akhirnya mengarah pada potensi *underfunding* atau *overfunding*, yang semuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas, yang secara efektif menghabiskan dana publik.

#### **2.1.4 Pendapatan Daerah**

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, pendapatan daerah meliputi:

## **1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Islami & Rahmawati, 2020) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Menurut Rahardjo (2011) Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan kemandirian lokal. Sedangkan menurut Halim dan Kusufi (2012) mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Adapun tujuan pendapatan asli daerah yaitu memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan ekonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

### **1. Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2009 pajak daerah merupakan iuran wajib yang harus dilakukan seseorang atau Badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang diterima. Menurut Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kemudian menurut Halim, Abdul, dan Kusufi (2013) pajak daerah dapat dibagi menurut wilayah pemungutan pajak:

a. Pajak Provinsi

Jenis pajak provinsi sebagai berikut:

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
2. Biaya balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

b. Pajak Kabupaten atau Kota:

Jenis pajak kabupaten atau kota sebagai berikut:

1. Pajak hotel.
2. Pajak restoran.
3. Pajak hiburan.
4. Pajak reklame.
5. Pajak penerangan jalan.
6. Pajak mineral bukan logam dan buatan.
7. Pajak parkir.
8. Pajak air tanah.
9. Pajak sarang burung wallet.

10. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
11. Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

1. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

2. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

3. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

#### 4. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

#### 5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh sumber alin.

#### 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

#### 7. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pook usaha maupun yang disediakan sebaai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

#### 8. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

#### 9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

#### 10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

#### 11. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan tanah dan/atau bangunan.

## 2. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat mengatakan bahwa retribusi adalah pungutan pajak daerah sebagai pembayaran atas jasa atau atau pemberian izin tertentu yang langsung dapat dirasakan langsung oleh pembayar retribusi.

Menurut Suandy (2014) dalam bukunya “Hukum Pajak” mengidentifikasikan pengertian retribusi adalah pungutan yang dilaukan oleh negara sehubungan dengan penggunaan jasa-jasa yang disediakan oleh

negara. Sedangkan Siahaan (2010) dalam bukunya “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” mengidentifikasi retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduknya secara perorangan. Definisi selanjutnya retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pada Pasal 1 angka 10 dijelaskan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berikut subjek retribusi menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009:

1. Subjek retribusi jasa umum

Orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek ini merupakan wajib retribusi jasa umum.

2. Subjek retribusi jasa usaha

Orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini merupakan wajib retribusi jasa usaha.

3. Subjek retribusi perizinan tertentu

Orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa perizinan tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini merupakan wajib retribusi perizinan tertentu.

**3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Hasil perusahaan daerah adalah bagian keuntungan atau laba bersih perusahaan daerah yang berupa pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah baik bagi perusahaan daerah yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun bagi perusahaan daerah yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

**4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa giro.

3. Pendapatan bunga.
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
5. Komisi, potongan, atau apapun bentuk lain, sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

## **2. Dana Perimbangan**

Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari:

### **1. Dana Bagi Hasil**

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai daerah dalam desentralisasi.

### **2. Dana Alokasi Umum**

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.

### **3. Dana Alokasi Khusus**

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kebutuhannya yang merupakan urusan daerah dan sesuai

dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

### **3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan hibah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun dalam bentuk barang dan atau/ jasa, termasuk tenaga ahli, dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

### **4. Pinjaman Daerah**

Pinjaman daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang - Undang No.54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah jenis pinjaman daerah terdiri atas:

1. Pinjaman jangka pendek yang digunakan untuk menutup kekurangan arus kas pada tahun anggaran yang bersangkutan. Pinjaman ini bersumber dari pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.
2. Pinjaman jangka menengah dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan. Pinjaman ini bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain,

lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat.

### **2.1.5 Kemandirian Keuangan Daerah**

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menjelaskan, kemandirian keuangan daerah berarti bahwa pemerintah dapat mengelola dana dan bertanggung jawab atas keuangannya sendiri dan melaksanakannya dalam rangka desentralisasi. Halim (2012) mengatakan bahwa kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan daerah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang membayar pajak dan retribusi sebagai sumber daya yang dibutuhkan daerah.

Kemampuan yang pemerintah daerah miliki untuk pembangunan, mendanai perekonomian serta mencukupi kebutuhan, dan pelayanan bagi masyarakatnya dengan tidak adanya campur dari pemerintah pusat. Perihal tersebut ditunjukkan dari pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang lain yang dipisahkan, retribusi, pendapatan pajak, serta dari lain-lain pendapatan yang sah adalah definisi dari kemandirian daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan dampak yang sangat besar bagi penyelenggaraan pemerintah daerah. Otonomi daerah melibatkan desentralisasi perpajakan, dengan daerah yang memiliki tingkat kekuatan pengelolaan keuangan yang tinggi. Dalam era otonomi, daerah harus meningkatkan kemandiriannya (secara finansial) dalam pembiayaan berbagai pengeluaran daerah, mengurangi

ketergantungan pembiayaan dari administrasi negara, dan juga meningkatkan nilai kemandirian daerah.

Menurut Rigel Nurul (2017) Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunanda pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain: Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana Darurat dan Pinjaman. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100$$

Dimana rasio ini menggambarkan ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer (sumber dana ekstern). Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak luar semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, maka semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemabngunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, maka semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapaan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi

daerah maka menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah dapat dikemukakan pada tabel berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Kemandirian (%)</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Rigel Nurul (2017)

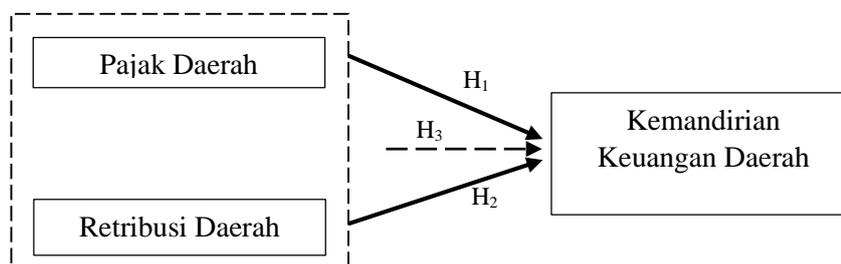
1. Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah.
2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Menurut Sugiyono (2019) menyatakan bahwa kerangka berpikir konsep bagaimana teori akan berhubungan dengan beragam aspek yang sudah

diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran pada penelitian ini menggambarkan pengaruh dari variabel independen yaitu pajak daerah ( $X_1$ ) dan retribusi daerah ( $X_2$ ), terhadap variabel dependen yaitu kemandirian keuangan daerah (Y).

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Pemikiran Penelitian**



**Keterangan gambar :**

- : Parsial merupakan pengaruh tiap-tiap variabel bebas terhadap variabel terkait.
- : Simultan merupakan pengaruh secara bersama terhadap variabel terikat.

### 2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019) hipotesis ialah jawaban sementara pada rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah penelitian telah dituangkan ke bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diperoleh hanya berdasarkan teori terkait. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka pemikiran yang disampaikan diatas, hipotesis penelitian ini yaitu:

1. Pajak daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemandirian Daerah merupakan kemampuan daerah dalam membiayai keperluan belanja dengan mengurangi ketergantungan dari pihak luar dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sunarto and Sunyoto (2016) menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis pertama yang akan diuji adalah:

H1 : Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

2. Retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Kemandirian suatu daerah akan terjadi apabila daerah mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada, untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian melalui peningkatan usaha daerah. Pembentukan usaha-usaha tersebut dapat memberikan masukan tambahan bagi daerah, terutama dalam pemberian izin-izin tertentu. Izin usaha tersebut memberikan banyak dana yang dapat digunakan untuk menambah kas daerah, sehingga kemandirian daerah

meningkat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sunarto and Sunyoto (2016) menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Maka dengan itu hipotesis yang kedua yang akan diuji adalah:

H2 : Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

3. Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan penerimaan atau pendapatan daerah. Pendapatan daerah akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan daerah. Semakin tinggi pendaptan daerah, semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerahh tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Novalistia (2016) menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Maka dengan itu hipotesis yang ketiga yang akan diuji adalah:

H3 : Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Tanjungpinang.

#### **2.4 Peneliti Terdahulu**

1. Pada jurnal Nggilu, Sabijono, and Tirayoh (2016) dengan judul *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten /Kota Di Provinsi Gorontalo*. Kemandirian daerah dalam otonomu daerah dapat diketahui melalui seberapa bear kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut agar

mampu membangun daerahnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Gorontalo dengan menggunakan data realisasi dari tahun 2009-2014. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik dengan menentukan derajat keyakinan pada uji t. Hasil pada penelitian ini adalah pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh positif juga signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.

2. Dalam jurnal Wahyuningsih (2015) dengan judul *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Bali Periode 2011-2015)*. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui apakah adanya pengaruh antar pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum dengan tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota provinsi Bali dengan menggunakan data 2011-2015. Pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa, pajak daerah yang dipungut dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum suatu daerah pada penelitian ini pajak daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Pengaruh retribusi daerah menggunakan uji t menunjukkan nilai signifikansinya

kurang dari 0,05 yang mengartikan signifikan sehingga dapat menambah tingkat kemandirian keuangan daerah. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah karena berdasarkan uji t tingkat signifikansi DAU lebih besar dari 0,964 dengan hasil -0,045% yang menunjukkan negatif dan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

3. Menurut Febriyanti and Faris (2017) dengan judul *Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017*. Pada penelitian ini pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2017 dengan masing-masing nilai t hitung sebesar 19.668 > t tabel 2,571 dan 5.158 > t tabel 2,571. Dan hasil yang diperoleh untuk uji simultan (Uji F) menunjukkan secara simultan ditunjukkan dari besarnya nilai  $F_{hitung}$  21.847 >  $F_{tabel} = 5,79$ .
4. Pada penelitian Siregar and Pratiwi (2017) dengan judul *“The Effect of Local Taxes and Retribution on Economic Growth in Indonesia”*. Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam upaya mendorong lajunya perekonomian serta mendukung upaya pertumbuhan ekonomi. Di tengah defisit APBN, pemerintah daerah perlu memperhatikan penggunaan pajak dan retribusi daerah yang efektif dan efisien. Dimana hal ini

menyebabkan pentingnya melihat sejauh mana dampak penerapan pajak dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk menganalisa adanya pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2014-2017 dimana pemerintah daerah berupaya meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis *Random Effects Model (REM)* menunjukkan bahwa variabel dari pajak daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan untuk variabel retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

5. Jurnal internasional terdahulu Fafurida and Pratiwi (2017) dengan judul "*Financial Independence of Regencies and Cities in Central Java*". Pada penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan kemandirian keuangan daerah. Proses pembangunan ekonomi pada suatu negara dipengaruhi oleh bentuk pemerintahannya. Di Indonesia telah terjadi perubahan pola pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi, dimana dampak dari desentralisasi fiskal bagi suatu negara tergantung pada pola dalam penyelenggaraan suatu negara. Penelitian ini menggunakan analisis rasio untuk mengidentifikasi analisis independensi dan tipologi keuangan untuk memetakan tingkat keuangan pemerintah daerah dan hasil yang didapatkan bahwa kemandirian keuangan cenderung meningkat di semua daerah Jawa Tengah. Rasio kemandirian di Kota Semarang dan Tegal

dinyatakan memiliki tingkat keuangan yang cukup tinggi ketergantungannya pada pemerintah pusat dengan pola hubungan konsultatif. Dimana kemandirian keuangan pemerintah daerah didasarkan pada tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah pusat, semakin sedikit tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat maka semakin baik, begitupun sebaliknya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2019) mengemukakan bahwa metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivism, yang digunakan untuk mendalami populasi serta sampel dan mengumpulkan data, menggunakan alat penelitian dan analisis data statistik untuk menguji hipotesis

Menurut Sugiyono (2019) metode kuantitatif dinamakan sebagai metode tradisional dikarenakan metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit, objektif, terukur, rasional, dan juga sistematis. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitiannya berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Sugiyono (2019) data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung, memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan yaitu sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, referensi jurnal, dan internet.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Data realisasi Pajak Daerah Kota Tanjungpinang.
2. Data realisasi Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang.
3. Laporan Realisasi Anggaran Kota Tanjungpinang.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiarto (2017) pengumpulan data dengan menggunakan alat yang dapat ditempuh untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti. Pengumpulan data ini digunakan untuk memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi dalam rangka mencapai tujuan peneliti. Teknik yang dipakai pada penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara penyalinan dan pengarsipan data-data dari sumber yang terkait. Pada penelitian ini penulis berusaha untuk melakukan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data mengenai realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah yang dapat dilihat pada laporan realisasi anggaran APBD Kota Tanjungpinang.

2. Studi Pustaka

Dalam melakukan studi pustaka, penulis berusaha untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan komprehensif, mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, serta referensi-referensi lain yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diangkat

dalam penulisan penelitian ini. Studi pustaka dalam penelitian ini memerlukan refensi dari buku-buku dan dokumen yang ada untuk mendukung penelitian seperti dokumen Laporan Realisasi Anggaran dari tahun 2017 sampai dengan 2021, struktur APBD Kota Tanjungpinang dari tahun 2017 sampai dengan 2021, buku Undang-Undang yang berlaku, buku Peraturan-Peraturan yang berlaku dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

### **3.4 Populasi dan Sampel**

#### **3.4.1 Populasi**

Menurut Sugiyono (2019) dalam bukunya menyebutkan bahwa pupolasi adalah keseluruhan satuan yang akan diteliti dan populasi juga wajib mewakili karakteristik penelitian yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tanjungpinang yang dihitung perbulan dari tahun 2017-2021.

#### **3.4.2 Sampel**

Sampel merupakan bagian dari jumlah serta karakteristik yang dimiliki populasi Sugiyono (2019). Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada di populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling*. Jenis sampel yang digunakan pada penelitian ini berupa sampling total, dimana sampling total merupakan teknik pengambilan sampel yang anggota populasinya dijadikan sebagai sampel Sugiyono (2019). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Pajak Daerah pada Pemerintah Kota Tanjungpinang.
2. Laporan Realisasi Retribusi Daerah pada Pemerintah Kota Tanjungpinang
3. Laporan Realisasi yang mempublikasikan Laporan Realisasi Anggaran selama periode 2017-2021.

### **3.5 Definisi Operasional Variabel**

Dalam penelitian ini “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”, maka variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemandirian keuangan daerah dan variabel independennya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk mengukur variabel-variabel diatas, penelitian terdahulu menjelaskan dan menentukan indikator yang terkait pada variabel tersebut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Variabel Dependen)

Jumlah rasio yang menjelaskan ketergantungan minimal terhadap sumber dana eksternal pendapatan asli daerah seperti dana perimbangan serta bantuan lain-lain yang sah. Semakin nilai tinggi rasio menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah kepada pusat menjadi semakin rendah.

2. Pajak Daerah (Variabel Independen)

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah tentang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Satuan hitung pajak daerah dalam penelitian ini adalah miliar rupiah.

3. Retribusi Daerah (Variabel independen)

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Satuan hitung retribusi daerah dalam penelitian ini adalah juta rupiah.

**Tabel 3. 1**  
**Definisi Operasional Variabel**

<b>Jenis Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Definisi Variabel</b>
Dependen	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Persen)	Kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah di bandingkan dengan Pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain. Balqis, Murdiati, and Amirah (2018)
Independen	Pajak Daerah (Rupiah)	Kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

		berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mardiasmo (2016)
	Retribusi Daerah (Rupiah)	Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Mardiasmo (2016)

Sumber: Data diolah penulis, 2022

### 3.6 Teknik Pengolahan Data

Menurut Misbahudin & Hasan (2013) Pengolahan Data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Data penelitian ini aan diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 26. Langkah-langkah pengolahan data kuantitatif yang dilakukan pada penelitian ini melalui proses *tabulating* dengan menggunakan rumus dan penyajian data. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Dana Perimbangan} + \text{Lain-lain Pendapatan yang Sah}} \times 100$$

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2019) dalam bukunya mengatakan bahwa analisis data yaitu tahapan mencari serta meringkas data yang didapatkan dari wawancara, observasi, catatan lapangan serta sumber lainnya agar mudah dimengerti oleh peneliti maupun orang lain. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan cara yang menggunakan teknik statistik untuk mengumpulkan data dari seluruh responden. Untuk menganalisis data yang diperoleh, maka dalam penelitian ini menggunakan program komputer *SPSS (Statistical Program For Social Science) versi 26.0 for windows*.

#### **3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Menurut Sugiyono (2016) dalam bukunya, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa adanya maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, perhitungan modus, median, mean, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Dalam penelitian ini akan dijelaskan statistik dari variabel-variabel yang digunakan yaitu variabel independen (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan variabel dependen (Kemandirian Keuangan Daerah).

### 3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan prasyarat analisis regresi berganda serta uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif. Sebelum melakukan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian maka perlu dilakukan pengujian uji asumsi klasik yang meliputi: uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

#### 3.7.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang dapat dikatakan baik adalah jika variabel independen dan variabel dependen memiliki nilai residual yang terdistribusi dengan normal Priyastama (2017). Data penelitian yang telah berdistribusi normal dapat dilanjutkan pengujiannya. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan grafik *probability plot*. Selain *probability plot* penelitian ini juga menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* sebagai berikut:

1. Jika hasil uji menunjukkan nilai signifikansi  $> 0,05$  maka data berdistribusi normal.
2. Jika hasil uji menunjukkan nilai signifikansi  $< 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal.

### 3.7.2.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada suatu pengamatan dengan periode sebelumnya Priyastama (2017). Jika terjadi autokorelasi maka dinamakan adanya masalah autokorelasi. Syarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi pada model regresi. Metode pengujian menggunakan uji *Durbin-Watson* (uji DW) dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika  $DU < DW < 4-DU$ , maka diterima yang artinya tidak terjadi autokorelasi.
2. Jika  $DW < DL$  atau  $DW > 4-DL$ , maka ditolak yang artinya terjadi autokorelasi.
3. Jika nilai  $DL < DW < DU$  atau  $4-DU < DW < 4-DL$ , artinya tidak ada kesimpulan yang pasti atau ragu-ragu.

### 3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya Ghozali (2018). Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas, dimana *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap. Dalam mendeteksi terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari grafik scatterplot dengan pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika grafik scatterplot terdapat atau membentuk pola tertentu seperti titik-titik beraturan yang membentuk suatu pola tertentu maka terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika grafik scatterplot tidak terdapat atau tidak membentuk pola tertentu yang jelas yaitu titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### **3.7.2.4 Uji Multikolonieritas**

Menurut (Priyatno, 2012) uji multikolonieritas adalah uji yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi penelitian terbentuk kolerasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas atau tidak. Jika dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolonieritas.

Dasar pengambilan keputusan yaitu dengan melihat nilai *tolerance* dan *Inflation factor* (VIF) pada model regresi apabila nilai *tolerance* kurang dari 10% dan nilai VIF diatas 10, maka diperkirakan terjadi multikolonieritas.

1. Apabila  $VIF > 10$  maka persamaan regresi terdapat multikolonieritas.
2. Apabila  $VIF < 10$  maka persamaan regresi tidak terdapat multikolonieritas.

#### **3.7.3 Uji Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen Priyastama (2017). Variabel independennya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

sedangkan variabel dependennya adalah Kemandirian Keuangan Daerah.

Persamaan analisis linier regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Dimana:

Y = Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

a = Nilai Konstan

X<sub>1</sub> = Pajak Daerah

X<sub>2</sub> = Retribusi Daerah

b<sub>1,2</sub> = Koefisien regresi dari masing-masing variabel independen

### **3.7.4 Uji Hipotesis**

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara individu dan bersama-sama mempengaruhi signifikan terhadap variabel dependen Uji statistik meliputi Uji t, Uji F, dan koefisien determinasi.

#### **3.7.4.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)**

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen Ghazali (2016) . Dasar pengambilan keputusannya adalah:

1. Apabila nilai signifikansi > 0,05, maka suatu variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau dalam hal ini hipotesis ditolak.

2. Bila nilai signifikansi  $< 0,05$ , maka variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen atau dalam hal ini hipotesis diterima. merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

#### **3.7.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)**

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Apabila nilai probabilitas signifikansi  $< 0,05$ , maka model penelitian ini adalah model yang layak atau pantas untuk digunakan Ghozali (2016).

#### **3.7.4.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas.

Jika koefisien determinasi sama dengan nol, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika besarnya koefisien determinasi meningkat angka 1, maka variabel independen berpengaruh sempurna terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan model ini, maka kesalahan pengganggu diusahakan minimum sehingga  $R^2$  mendekati 1, sehingga perkiraan regresi akan lebih mendekati keadaan yang sebenarnya Ghozali (2016)

## DAFTAR PUSTAKA

- Aristanti, W. (2011). *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map*. Ghozali, Imam.
- Artini, I. g. ., & Mahardika, I. g. n. . (2014). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Era Otonomi Pada Pemerintahan Kabupaten Tabanan. *E-Journal Manajemen*, 3 No. 3.
- Balqis, Murdiati, S., & Amirah. (2018). *Pengaruh Penerapan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah (DPPKAD) Eks Karesidenan Pekalongan Pada Tahun 2013-2017*. IX(2).
- Fafurida, & Pratiwi, E. (2017). *Financial independence of regencies and cities in Central Java*. 9(October), 199–209. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol9.iss2.art9>
- Febriyanti, F., & Faris, M. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten /Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 3017, 162–175.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Motivasi Dengan Program IBM SPSS 25*. Undip.
- Halim, A., & Kusufi, S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: teori, konsep dan aplikasi*. Salemba Empat.
- Halim, Abdul, & Kusufi, dan M. S. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Islami, D., & Rahmawati, L. (2020). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017. *OECOMICUS Journal of Economics*, 4(2), 169–179. <https://doi.org/10.15642/oje.2020.4.2.169-179>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Kadafi, M., & Putra, wendy wewisa. (2013). *Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Samarnda 2001-2010)*. 17–18.
- Mamonto, sandry yossi, Kalangi, J. b., & Tolosang, krest D. (2014). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal*. 1–14.

- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. CV Andi Offset.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Misbahudin, & Hasan, I. (2013). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Bumi Aksara.
- Nggilu, F., Sabijono, H., & Tirayoh, V. (2016). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo*. 16(04), 623–635.
- Nogi S. Tangkilisan, & Hessel. (2007). *Manajemen Publik*. Geasindo.
- Novalistia, R. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Journal Of Accounting*, 2(2).
- Novitasari, M., & Novitasari, L. (2019). *Pengaruh Pajak, Retribusi, DBH, Belanja Modal, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah*. 3(2).
- Nugraha, I. P. (2016). Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU Dan DBH Pada Belanja Modal. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(33), 284–311.
- Nugroho, P. I., Andreas, H. H., & Ardeni, A. (2017). Konservatisme Akuntansi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20.
- Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019.
- Priyastama, R. (2017). *Buku Sakti Kuasai SPSS*. Star Up.
- Rahardjo, A. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Penerbit Graha Ilmu.
- Siahaan, M. P. (2010). *Hukum Pajak Elementer*. Graha Ilmu.
- Siregar, B., & Pratiwi, N. (2017). *The Effect Of Local Government Characteristic And Financial Independence On Economic Growth And Human Development Index In Indonesia*. 19(2), 65–71. <https://doi.org/10.9744/jmk.19.2.65>
- Suandy, E. (2014). *Hukum Pajak, Edisi 6*. Salemba Empat.
- Sugiarto. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Andi.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Alfabeta.
- Sunarto, & Sunyoto, Y. (2016). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap kemandirian Daerah Yang Berdampak Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Empirirs Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah). *Jurnal Dharma Ekonomi*, 43, 13–22.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Wahyuningsih, P. (2015). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Bali Periode 2011-2015)*. 01(32), 1–12.

## *Curriculum Vitae*



### A. PERSONAL INFORMATION

Full Name : Nur Khumairah Ely  
Gender : Female  
Place and Date of Birth : Tanjungpinang, 15 January 2000  
Citizen : Indonesia  
Age : 22 years old  
Present Address : Jl. Abadi Blok C No.20  
Religion : Islamic  
Email : khumairahe@gmail.com  
Phone Number : 0899-2050-473

### B. EDUCATIONAL BACKGROUND

Type of school	Name of school & location	Year Of Completed
Elementary School	SDN 012 Bukit Bestari	2012
Junior High School	SMPN 4 Tanjungpinang	2015
Senior High School	SMAN 4 Tanjungpinang	2018